

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hubungan Tiongkok-Taiwan dapat dikatakan merupakan hubungan yang cukup rumit dan mengalami pasang surut. Perebutan kekuasaan pemerintahan antara pihak nasionalis dan komunis di daratan pasca runtuhnya dinasti Tiongkok merupakan sebuah refleksi dari obsesi dan idealisme rakyat Tiongkok terhadap wilayahnya. Konflik antara Tiongkok-Taiwan terjadi disebabkan karena banyaknya perbedaan ideology sehingga melahirkan perang saudara antara Partai Nasionalis Tiongkok (PNC) dan Partai Komunis Tiongkok (PKC) tahun 1945 sampai 1949 di daratan Tiongkok. Pada perang sipil antara PNC dengan PKC, pasukan PNC yang dipimpin oleh Chiang Kaishek mengalami kekalahan dan mundur ke pulau Formosa, atau yang saat ini dikenal dengan Taiwan.<sup>1</sup>

Pasca kemenangan Partai Komunis pada perang sipil tersebut, Chang Kai-shek serta pasukan dan pengikutnya kabur dan mengasingkan diri untuk mencari wilayah dan mendirikan suatu Negara yang sejalan dengan visi dan misi mereka tanpa pengaruh dari paham komunis. Akan tetapi, usaha Chang Kia-shek dan pengikutnya seringkali digagalkan oleh Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok). Berbagai macam rintangan dan pemberontakan dihadapi oleh Chang Kai-Shek untuk dapat membebaskan diri dari “jajahan” Tiongkok.

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, *Menengok hubungan Taiwan-Tiongkok: musuh tapi mesrah*, diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151105135044-113-89679/menengok-hubungan-taiwan-Tiongkok-musuh-tapi-mesra>. (29/4/2019, 08:16 WIB)

Republik Rakyat Tiongkok (RRC) menyatakan bahwa pemerintahannya merupakan pemerintahan yang sah atas keseluruhan Tiongkok termasuk di dalamnya Taiwan yang kemudian dikenal dengan istilah *One Tiongkok Policy*<sup>2</sup>. Kebijakan yang diimplementasikan dalam konsensus 1992 (*One Tiongkok Policy*) memiliki tujuan untuk menyatukan kedaulatan bagian dari wilayah Tiongkok yang terpisah, seperti Taiwan yang merupakan satu kesatuan dari daratan Tiongkok dengan menggunakan cara yang damai. Salah satu kebijakan *One Tiongkok Policy* adalah bahwa setiap Negara yang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan diplomatic dengan Tiongkok maka Negara tersebut harus memutuskan hubungan diplomaticnya dengan Taiwan.<sup>3</sup>

Saat ini Taiwan diakui sebagai sebuah kesatuan negara oleh beberapa negara, akan tetapi Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap Taiwan merupakan salah satu provinsi yang tidak dapat dipisahkan dari Tiongkok. Taiwan merupakan sebuah negara secara *de facto* karena telah memiliki sejumlah penduduk, pemerintahan, wilayah dan syarat-syarat lainnya untuk diakui sebagai sebuah negara. Akan tetapi secara *de jure*, Taiwan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara dan juga PBB menolak untuk mengakui bahwa Pemerintahan Taiwan adalah sebuah negara. Tidak diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara oleh sebagian besar negara didunia merupakan sebuah proplem besar bagi Taiwan dalam menjalin hubungan diplomatic dan hubungan kerjasama secara luas.

---

<sup>2</sup> Bambang Julyanto, 2012, *Upaya Strategis Taiwan Dalam Menghadapi One Tiongkok Policy*, Skripsi Thesis, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 15

<sup>3</sup> Mila Cahya Listiana F., 2018, *Kebijakan One Tiongkok Policy Versi Taiwan Sebagai Respon Reunifikasi Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Lee Teng Hui*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dalam <http://eprints.umm.ac.id/40189/> (20/10/2019, 09:12 WIB)

Tahun 2016, Taiwan memasuki sebuah babak baru setelah Tsai Ing-Wen terpilih sebagai presiden dan menjadikannya sebagai presiden wanita pertama sejak Taiwan memerdekakan diri dari Tiongkok. Tsai, dari Partai Progresif Demokratik (DPP) memenangkan pemilu pada tanggal 16 Januari 2016. Tsai bukan hanya menjadi presiden wanita pertama Taiwan, namun ia juga langsung dihadapkan pada tugas berat dalam memimpin dengan ancaman Tiongkok yang terus menuju ke negaranya. Tsai mengatakan bahwa dia ingin mewujudkan relasi konsisten dengan Tiongkok dan tidak akan bertindak secara agitatif demi menjaga *status quo*.<sup>4</sup>

Selama ini, Tiongkok masih menganggap bahwa pemerintahan Taiwan beroperasi di bawah pemerintahannya dan tidak dapat dipisahkan dari Tiongkok, meski Taiwan memiliki pasukan militer dan mata uangnya sendiri. Masalah muncul ketika Tiongkok, yang saat ini menapaki jalan menuju status sebagai salah satu negeri adidaya (*superpower*). Tiongkok tak segan-segan memutus hubungan diplomatic dengan negara-negara yang menjalin hubungan diplomasi dan secara formal mengakui kemerdekaan Taiwan.<sup>5</sup>

Hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok semakin memburuk semenjak Tsai Ing-Wen menjabat sebagai presiden. Sejak saat itu, Taiwan secara agresif terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan negara lain sebagai sebuah negara merdeka. Sebaliknya, Tiongkok juga bersikeras menganggap Taiwan sebagai pembangkang yang memisahkan diri dari Tiongkok. Banyaknya negara yang

---

<sup>4</sup> Sita Hadriyah, 2016, *Hubungan Politik Taiwan Tiongkok Setelah terpilihnya Presiden Baru Taiwan*, Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VIII, No. 02/II/P3DI/Januari/2016, diakses dalam [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-60.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-60.pdf) (3/3/2019, 20:13 WIB)

<sup>5</sup> Tony Firman, 2018, *Ramai-Ramai Tarik Dubes dari Taiwan Setelah Digencet Beijing*, diakses dalam <https://tirto.id/ramai-ramai-tarik-dubes-dari-taiwan-setelah-digencet-beijing-cUvJ> (20/2/2019, 01:50 WIB)

memilih untuk memisahkan diri dengan Taiwan dan lebih memilih untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok bukan karena ketidakberdayan Taiwan untuk mempertahankan hubungan diplomatiknya akan tetapi karena adanya tindakan Tiongkok yang berusaha untuk membatasi upaya diplomatik Taiwan.<sup>6</sup>

Sejak kepemimpinan Tsai, 3 negara di Amerika Latin dan Karibia memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan akibat tekanan Tiongkok. Ke tiga negara tersebut adalah Republik Dominika, Panama dan El Salvador.<sup>7</sup> Hingga saat ini hanya tersisa 17 negara dari 22 negara yang masih mengakui Taiwan sebagai negara secara diplomatik.<sup>8</sup> Republik Dominika diketahui memutuskan hubungan yang sudah terjalin selama 77 tahun dengan Taiwan setelah menerima tawaran paket insentif ekonomi dari Tiongkok senilai US\$ 3.1 Miliar dalam bentuk investasi dan pinjaman.<sup>9</sup> Panama memutuskan hubungan dengan Taiwan yang sudah terjalin sejak 1912 setelah Tiongkok memulai pembangunan pelabuhan kontainer dengan fasilitas gas alam di sebuah provinsi di bagian utara Panama. Adapun El Salvador memutuskan hubungannya dengan Taiwan ketika El Salvador meminta dana besar untuk merampungkan proyek pembangunan pelabuhan akan tetapi

---

<sup>6</sup> *Op.cit.* hal 4

<sup>7</sup> Andi Dahmer dan Timothy S. Rich, *Taiwan's Diplomatic Relation in Central America: A Historical Legacy or Enduring Partnership?*, Western Kentucky University, hal. 2, diakses dalam <http://aacs.ccny.cuny.edu/2018conference/Dahmer%20Rich%20%20ACS%20paper%209-20-18.pdf> (2/2/2019, 20:10 WIB)

<sup>8</sup> CNN Indonesia, *Taiwan Sebut Sepak Terjang Tiongkok Ancam Negaranya*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181010150017-134-337333/taiwan-sebut-sepak-terjang-Tiongkok-ancam-negaranya> (2/2/2019, 21:45 WIB)

<sup>9</sup> Rizki Akbar, 2018, *Putuskan Hubungan dengan Taiwan Republik Dominika Merapat ke Tiongkok*, diakses dalam <https://www.liputan6.com/global/read/3497063/putuskan-hubungan-dengan-taiwan-republik-dominika-merapat-ke-Tiongkok> (3/2/2019, 00:05 WIB)

permintaan tersebut ditolak oleh Taiwan dengan alasan bahwa kedua negara akan terjatuh hutang.<sup>10</sup>

Tiongkok sendiri terus meningkatkan investasi dan kehadiran mereka di Amerika Latin dan Karibia, dengan menawarkan investasi langsung sebesar \$250 juta di kawasan tersebut. Menurut Lin Chong-pin, Tiongkok akan terus memperkuat iming-iming ekonomi dan interaksi diplomasiknya dengan negara-negara yang masih mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang sah.<sup>11</sup> Tiongkok juga mendorong negara-negara di Amerika Latin dan Karibia untuk ambil bagian dalam “Inisiatif Sabuk dan Jalan” (*one Belt and one Road (OBOR) Initiative*), proyek besar yang diluncurkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mendongkrak hubungan perdagangan dan infrastruktur.

Berkaitan dengan kebijakan OBOR (*Belt and Road Initiative*), Tiongkok tidak hanya melebarkan sayapnya di Amerika Latin dan Karibia saja akan tetapi di beberapa kawasan seperti Asia dan Afrika. Dalam penelitian ini, kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi menarik dikarenakan terdapat 3 negara yang masuk dalam kawasan tersebut memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas. Yang menarik adalah upaya Tiongkok untuk mengisolasi Taiwan dari kancah dunia internasional. Kawasan Amerika Latin dan Karibia merupakan salah satu kawasan di mana seperempat sekutu Taiwan berada, dari 33 Negara yang ada di sana, 12 Negara menjalin hubungan diplomatik

---

<sup>10</sup> Sonya Michaela, *Taiwan Putus hubungan Diplomatik dengan El Salvador*, diakses dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/179851-taiwan-putus-hubungan-diplomatik-dengan-el-salvador.html> (3/2/2019, 00:10 WIB)

<sup>11</sup> Raleph Jennings, *AS Tambah Dukungan Untuk Taiwan, Tiongkok Bersiap melawan*, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/as-tambah-dukungan-untuk-taiwan-Tiongkok-bersiap-melawan-/4564785.html> (3/2/2019, 01:00 WIB)

dengan Taiwan dan 22 Negara lebih untuk merapat kepada Tiongkok. Akan tetapi dengan lepasnya 3 negara tersebut, semakin memperburuk kondisi Taiwan untuk mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya di atas tentang terpilihnya gerak-gerik Tiongkok di wilayah Amerika Latin dan Karibia serta hubungannya dengan pemutusan hubungan diplomatik negara-negara tersebut dengan Taiwan maka judul yang diambil adalah “Pengaruh Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apa Pengaruh Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini, seperti yang telah dipaparkan pada latarbelakang dan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Tiongkok terhadap Putusnya Hubungan Diplomatic Taiwan Dengan 3 (Tiga) Negara Di Amerika Latin dan Karibia.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui tentang Pengaruh Tiongkok terhadap Putusnya Hubungan Diplomatik Taiwan Dengan 3 (Tiga) Negara di Amerika Latin dan Karibia. Oleh karena itu, penelitian ini diharap dapat menambahkan sumber rujukan bagi mahasiswa Ilmu hubungan Internasional terkait Pengaruh Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam tulisan ini adalah tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Tiongkok terhadap Putusnya Hubungan Diplomatik Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia Selain itu, diharapkan dapat membantu praktisi seperti NGOs, pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dalam mengembangkan penelitian tentang Pengaruh Tiongkok terhadap Putusnya Hubungan Diplomatik Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam tulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diambil 5 (lima) penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan sebagai data pendukung dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terkait dengan “Pengaruh Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia”. Penelitian pertama

ditulis oleh **Sita Hidriyah**<sup>12</sup> yang berjudul **“Hubungan Politik Taiwan-Tiongkok Pasca terpilihnya Presiden Baru Taiwan”**. Dalam tulisan ini Sita Hidriyah memaparkan tentang pemilu Taiwan pada tahun 2016 di mana Tsai Ing-Wen terpilih dan menjadi presiden wanita pertama di Taiwan sejak melepaskan diri dari Tiongkok. Tsai Ing-Wen Berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP). DPP memenangkan konstestasi dengan partai Kuomintang (KMT) yang bersahabat dengan Tiongkok, Eric Chu dengan jumlah suara 32,5%. Dukungan atas Taiwan bertambah semenjak 2014 ketika ratusan mahasiswa mengambil alih parlemen Taiwan selama berminggu-minggu untuk menyampaikan protes terhadap undang-undang perdagangan Tiongkok. Dukungan terhadap Tsai melonjak karena masyarakat pemilih khawatir akan upaya pendekatan Tiongkok dan dianggap dapat menghilangkan independensi Taiwan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, Ma Ying Jeou.

Pemilu Taiwan menjadi pusat perhatian Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memprotes kehendak Taiwan untuk merdeka. Selanjutnya, pasca kemenangan Tsai Ing-Wen, kantor untuk urusan Taiwan milik Tiongkok memperingatkan akan memprotes setiap langkah menuju kemerdekaan Taiwan dan kembali menegaskan tentang “konsensus 92” yaitu *one Tiongkok policy*. Kemenangan Tsai diprediksi akan memberikan udara segar dalam usaha memerdekakan diri dari Tiongkok, dan dapat bermuara pada ketidakseimbangan di Tiongkok. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga bertekad untuk melindungi independensi negara dan integritas

---

<sup>12</sup> Sita Hadriyah, 2016, *Hubungan Politik Taiwan-Tiongkok Pasca terpilihnya Presiden Baru Taiwan*, Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VIII, No. 02/II/P3DI/Januari/2016, diakses dalam [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-60.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-60.pdf) (3/3/2019, 20:13 WIB)



wilayah. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan acuh akan perubahan yang mungkin terjadi di Taiwan. Namun, Pemerintah Tiongkok tidak akan pernah merubah kebijakan untuk terus memprotes kemerdekaan resmi Taiwan dan teguh pada satu prinsip kesatuan yaitu daratan Taiwan milik Tiongkok.

Penelitian Siti Hidriah di atas memberikan gambaran tentang hubungan Tiongkok dengan Taiwan pasca terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden baru Taiwan di mana penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang semakin memburuknya hubungan Tiongkok dengan Taiwan setelah Tsai Ing-wen mendeklarasikan bahwa ia akan tetap mempertahankan status quo nya. hal ini disinyalir akan membuat Tiongkok semakin gencar melancarkan “serangan” kepada Taiwan.

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh **Evan Ellis**<sup>13</sup> dalam papernya yang berjudul “*Taiwan’s Struggle for Partners and Survival*”. Evan dalam papernya memaparkan tentang kemajuan diplomatik RRC di Amerika Latin dan Karibia. Tsai yang secara eksplisit menolak untuk menerima “konsensus 1992” ditanggapi oleh RRC dengan kampanye intimidasi ekonomi dan diplomatic. Dalam kongres 19 partai komunis Tiongkok pada bulan oktober 2017, kepemimpinan RRC bertujuan untuk melanjutkan isolasi internasional Taiwan untuk secara aktif merekrut aliansi diplomatik negara-negara yang masih mengakui ROC sebagai sebuah negara. Dampak dari serangan RRC tersebut berakibat pada pemutusan hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara seperti Gambia, Sao Tome dan principe,

---

<sup>13</sup> Evan Ellis, 2018, *Taiwan’s Struggle for Partners and Survival*. Global American (Smart News & Research for Latin America’s Changemakers), diakses dalam [http://www.academia.edu/37933675/Taiwans\\_struggle\\_for\\_partners\\_and\\_survival0](http://www.academia.edu/37933675/Taiwans_struggle_for_partners_and_survival0) (27/2/2019, 22:10 WIB)

republic Dominika, El Salvador, Burkina Faso, dan Panama yang kemudian beralih menjalin hubungan diplomatic dengan Tiongkok (RRC).

Lebih lanjut Evan menjelaskan tentang buruknya kinerja DPP dalam pemilihan lokal. Beberapa menjelaskan bahwa kinerja DPP yang buruk karena adanya indikasi gangguan dari Daratan (Tiongkok), termasuk di dalamnya kampanye di media social yang dirancang untuk menggambarkan DPP dalam kemungkinan terburuk. Apapun penjelasan tentang hasil pemilu dan buruknya kinerja DPP, jajak pendapat menunjukkan bahwa Taiwan telah memeluk sebuah identitas yang berbeda dengan daratan yaitu menolak gagasan bahwa mereka adalah bagian dari “satu Tiongkok”. Terlepas dari hal tersebut, beberapa analis Taiwan khawatir bahwa hasil pemilu dapat mempercepat pembelotan negara-negara Amerika Latin dan Karibia ke RRC.

Selanjutnya Evan menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan negara yang memutuskan untuk tetap mengakui Taiwan dan negara yang mengalihkan hubungan diplomatiknya dengan RRC. Pertama, hampir semua negara yang mengakui Taiwan setidaknya mempertimbangkan keuntungan dari mengubah posisi mereka, namun sama-sama sadar akan risikonya. Pada tingkat tertentu, respon AS yang kuat terhadap peralihan oleh Panama, Republik Dominika, dan El Salvador cenderung membuat negara lain memikirkan kembali posisi mereka sendiri dan memunculkan kemungkinan untuk menunda keputusan mereka. Adapun bagi negara-negara yang mengakui ROC, prospek beralih ke RRC adalah masalah yang dapat menimbulkan perpecahbelahan, dengan beberapa politisi dan pengusaha digerakkan oleh prospek untuk mendapatkan keuntungan, mungkin melibatkan proyek bisnis mereka dengan RRC, sementara yang lain memiliki

ketakutan bahwa efek membiarkan RRT masuk dalam ruang bisnis mereka dapat mengkhianati kesetiaan Taiwan, atau mengambil langkah-langkah yang akan memindahkan negara mereka dari ikatannya dengan AS, lembaga-lembaga barat dan demokrasi.

Penelitian terdahulu di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini. Penelitian di atas memberikan gambaran tentang putusnya hubungan Taiwan dengan Negara-negara sekutunya di Amerika Latin dan Karibia disebabkan karena adanya campur tangan Tiongkok. Kebijakan “*one Tiongkok policy*” menjadi salah satu senjata Tiongkok untuk menjauhkan Taiwan dengan Negara-negara yang mengakuinya sebagai sebuah Negara yang sah.

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis Alvia Syafiq<sup>14</sup> dalam skripsinya yang berjudul “**Aliansi Pertahanan Taiwan-Amerika Serikat dalam Menghadapi One Tiongkok Policy periode 2011-2014**”. Alvia menjelaskan dalam skripsinya bahwa Taiwan dan AS sudah melakukan aliansi pertahanan sejak zaman perang ke II dan terus berlanjut. Aliansi yang keduanya bangun sejak lama bukanlah tanpa adanya tujuan, mereka membentuk aliansi pertahanan dengan tujuan yang sama yakni melawan kebijakan “*One Tiongkok Policy*”. kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah power baru di dunia internasional, lebih khusus dalam bidang militer, menjadikan Taiwan perlu terus membentuk aliansi pertahanan dengan AS. Lebih lanjut Alvia menjelaskan bahwa pada rentang waktu 2011-2014 ditemukan bukti bahwasanya Taiwan terus berupaya meningkatkan anggaran militernya untuk bertahan dari ancaman Tiongkok yang semakin intens. Bukan hanya Taiwan, AS

---

<sup>14</sup> Alvia Syafiq, 2016, *Aliansi Pertahanan Taiwan-Amerika Serikat dalam Menghadapi One Tiongkok Policy periode 2011-2014*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, UIN Syarif Hidayatullah

pun memperoleh keuntungan dari ikatan aliansi ini. Keuntungan tersebut berbentuk keuntungan AS yang tetap bisa menjaga reputasi serta pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sebagai negara *superpower*. Aliansi yang dibentuk Taiwan dengan AS terbukti dapat meredam agresi Tiongkok atas Taiwan. Adapun jenis penelitian yang Alvia digunakan dalam skripsinya jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai alat pengumpulan data. Adapun konsep yang digunakan oleh Alvia untuk menganalisis skripsinya adalah konsep national interest, konsep aliansi, dan konsep *bandwagoning*.

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alvia. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan Tiongkok “*common enemy*” akan tetapi dalam penelitian di atas menggambarkan tentang jalinan kerjasama antara Taiwan dengan Amerika Serikat untuk melawan kebijakan “*one Tiongkok policy*” pasca bangkitnya Tiongkok sebagai sebuah kekuatan baru di dunia.

**Andy Dahmer dan Timothy S. Rich**<sup>15</sup> dalam papernya yang berjudul “**Taiwan’s Diplomatic Relations in Central America: A Historical Legacy or Enduring Partnership?**” memaparkan tentang hubungan diplomatik Taiwan di Amerika Tengah. Di awal papernya Andy dan Timothy memaparkan tentang negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan kemudian beralih ke Tiongkok sejak kepemimpinan Tsai Ing Wen. Di antara 5

---

<sup>15</sup> Andy Dahmer & Timothy S. Rich, 2018, *Taiwan’s Diplomatic Relations in Central America: A Historical Legacy or Enduring Partnership*, Draft for AACS 2018, diakses dalam <http://aacs.ccny.cuny.edu/2018conference/Dahmer%20Rich%20%20AACS%20paper%209-20-18.pdf> (10/03/2019, 22:10 WIB)

negara tersebut adalah Panama, Sao Tome dan Principe, Republik Dominika, El Salvador, dan Gambia.

Selanjutnya, Andy dan Timothy menjelaskan tentang upaya diplomatik Taiwan di Amerika Tengah yang menurut mereka terdapat 3 faktor yang mendukung upaya Taiwan dalam menjalin hubungan diplomatik di Amerika Tengah, yaitu: Perdagangan, bantuan dan investasi, dan keterlibatan Taiwan dalam organisasi pemerintah.

Lebih jauh mereka menjelaskan tentang kegagalan Taiwan dalam mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan 5 negara tersebut adalah karena adanya intervensi Tiongkok untuk membatasi upaya diplomatik Taiwan. Pemutusan hubungan diplomatik 5 tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan kebijakan “*one Tiongkok policy*” di mana negara tersebut harus memilih untuk ROC atau RRC saja. Selain itu, alasan ekonomi juga merupakan salah faktor yang mendukung pemutusan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok.

Penelitian terdahulu di atas memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun keterkaitan tersebut adalah tentang keterlibatan Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatic Taiwan dengan 5 negara sekutunya di Amerika Latin dan Karibia dan Afrika. Andy dan Timothy memaparkan bahwa Tiongkok melakukan intervensi untuk membatasi upaya Taiwan dalam menjalin hubungan diplomatic. Hal tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa putusnya hubungan diplomatic Taiwan dengan Negara-negara sekutunya karena adanya pengaruh dan intervensi dari Tiongkok.

Penelitian terdahulu terakhir ditulis oleh **Elisa Hsiu-chi Wang**<sup>16</sup> dalam tulisannya **“Challenges for The Republic of Tiongkok: Diplomatic Relations with Latin America after The Regime Rotation in 2016”**. Dalam jurnal yang ditulis Elisa dijelaskan bahwa hanya ada beberapa negara di dunia yang mendukung Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Dan dalam kompetisi diplomatik, Taiwan kehilangan banyak keuntungan akibat ancaman dari Tiongkok. Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintahan Ma Ying-jeou merepresentasikan sebuah langkah yang disebut genjatan senjata diplomatik. Dalam genjatan diplomatik ini Tiongkok berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat Taiwan. Dengan menandatangani serangkaian perjanjian komersial dan genjatan senjata diplomatik, Beijing, pada kenyataannya hanya ingin memperingatkan Taiwan bahwa mereka mampu merampas lebih banyak sekutu diplomatik Taiwan jika mereka mau. Meskipun demikian, Taiwan tetap dapat menjaga hubungan diplomatik mereka melalui sarana ekonomi dan keuangan.

Terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden Taiwan genjatan senjata diplomatik berakhir dan ketegangan dengan Tiongkok kembali meningkat. Tsai kemudian kehilangan sekutu diplomatiknya di Afrika dan Amerika Tengah. Tsai harus sadar akan kenyataan ancaman Tiongkok dan menyingkirkan ambiguitas. Jika kebuntuan terus berlanjut, Taiwan akan menghadapi risiko isolasi ekonomi dan politik.

---

<sup>16</sup> Elisa Hsiu-chi Wang, 2017, *Challenges for The Republic of Tiongkok: Diplomatic Relations with Latin America after The Regime Rotation in 2016*, Tamkang University, jurnal UNISCI, no. 46 (Enero/January 2018) diakses dalam <http://dx.doi.org/10.5209/RUNI.58377> (10/3/20109, 23:00 WIB)

Dalam memperjuangkan legitimasi Taiwan, Amerika Serikat merupakan sekutu utamanya, dan sejak saat itu UU hubungan Taiwan disahkan pada tahun 1979. Mereka menjual berbagai sistem persenjataan dan menyediakan pelatihan militer secara teratur. Keterlibatan AS dianggap Tiongkok mengganggu stabilitas wilayah antara keduanya. Dukungan AS terhadap Taiwan merupakan bentuk kompensasi atas terputusnya hubungan, tetapi harus menjadi pertimbangan strategis. Pembentukan hubungan diplomatik beberapa Negara di Amerika Latin dan Karibia dengan Tiongkok berarti menunjukkan peningkatan pengaruh Tiongkok di AS.

Penelitian terdahulu terakhir di atas memberikan gambaran yang cukup tentang penelitian yang akan dilakukan yaitu pengaruh Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatic Taiwan dengan 3 Negara di Amerika Latin dan Karibia. Dalam penelitian di atas dijelaskan bahwa Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup besar di Amerika Serikat sehingga menyebabkan beberapa Negara di sana memutuskan hubungan diplomatic dengan Taiwan.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Sita Hadriyah. 2016. Hubungan Politik Taiwan-Tiongkok Pasca terpilihnya Presiden Baru Taiwan.	- Kualitatif Deskriptif	- Tsai Ing-Wen terpilih dan menjadi presiden wanita pertama di Taiwan sejak melepaskan diri dari Tiongkok. Tsai Ing-Wen Berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP). DPP memenangkan konstestasi dengan partai penguasa

			<p>Kuomintang (KMT) yang bersahabat dengan Tiongkok, Eric Chu dengan jumlah suara 32,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan terhadap Tsai melonjak karena masyarakat khawatir atas upaya pendekatan dengan Tiongkok dan dianggap dapat menghilangkan independensi Taiwan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, Ma Ying Jeou.</li> <li>- Hubungan antara Taiwan-Tiongkok memanas karena penolakan eksplisit Tsai Ing-Wen terhadap konsensus 1992</li> </ul>
2.	Evan <i>“Taiwan’s Struggle Partners Survival”</i>	Ellis. <i>for and</i>	<p>- Kualitatif Deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kongres 19 partai komunis Tiongkok pada bulan oktober 2017, kepemimpinan RRC bertujuan untuk melanjutkan isolasi internasional Taiwan untuk secara aktif merekrut aliansi diplomatik negara-negara yang masih mengakui ROC sebagai sebuah negara.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak dari serangan RRC tersebut berakibat pada pemutusan hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara seperti Gambia, Sao Tome dan principe, republic Dominika, El Salvador, Burkina Faso, dan Panama yang kemudian beralih menjalin hubungan diplomatic dengan Tiongkok (RRC).</li> </ul>
3.	Alvia Syafiqah. <b>“Aliansi Pertahanan Taiwan-Amerika Serikat dalam Menghadapi <i>One Tiongkok Policy</i> periode 2011-2014”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif</li> <li>- Konsep Kepentingan Nasional, konsep Aliansi, dan konsep <i>Bandwagoning</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangkitnya Tiongkok sebagai power baru di dunia internasional khususnya dalam bidang militer, membuat Taiwan perlu terus beraliansi pertahanan dengan AS</li> <li>- Taiwan meningkatkan anggaran militernya demi membendung ancaman dari Tiongkok</li> <li>- Aliansi yang dibentuk oleh Taiwan dengan AS terbukti dapat meredam serangan Tiongkok terhadap Taiwan</li> </ul>

4.	<p><b>Andy Dahmer dan Timothy S. Rich.</b></p> <p>“Taiwan’s Diplomatic Relations in Central America: A Historical Legacy or Enduring Partnership”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif Deskriptif</li> <li>- Studi literatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutusan hubungan diplomatik 5 negara dari Taiwan ke Tiongkok.</li> <li>- 3 faktor yang mempengaruhi Taiwan dapat menjalin hubungan diplomatik di wilayah Amerika Tengah di antaranya Perdagangan, bantuan dan investasi, dan keterlibatan Taiwan dalam organisasi pemerintah</li> <li>- Kebijakan “<i>one Tiongkok policy</i>” yang mengharuskan negara-negara memilih untuk antara Taiwan dan Tiongkok.</li> <li>- Intervensi Tiongkok untuk menghambat upaya diplomasi Taiwan.</li> </ul>
5.	<p>Elisa Hsiu-chi Wang. Challenges for The Republic of Tiongkok: Diplomatic Relations with Latin America after The Regime Rotation in 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deskriptif</li> <li>- Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ma Ying-Jeou melakukan genjatan senjata diplomatik untuk meredam ancaman Tiongkok.</li> <li>- Di bawah kepemimpinan Tsai, hubungan Taiwan dengan Tiongkok kembali memanas. Ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara yang kemudian beralih ke Tiongkok.</li> <li>- Taiwan menjalin hubungan dengan AS sebagai upaya untuk mempertahankan legitimasi Taiwan.</li> </ul>

## 1.5 Kajian Teori/Konsep

### 1.5.1 Konsep Hegemoni

Hegemoni merupakan salah satu kajian Hubungan Internasional. Istilah hegemoni sejajar dengan istilah *hiper power* yang memiliki kemiripan makna namun berbeda dari istilah *super power* atau kekuatan regional. Dalam hegemoni berarti penguasaan dominan sebuah negara dalam system dunia internasional yang juga berkuasa berdasarkan pengaruh dalam aspek ekonomi dan militer. Pengertian hegemoni ini sendiri bukan hanya sekedar negara yang mempunyai kekuatan yang tinggi tetapi juga dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai sistem dunia internasional.<sup>17</sup>

Konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Vedrine sama dengan arti hegemoni sebagai “*hiper power*”, akan tetapi kemudian Vedrine memperluas perspektif elemen untuk mengukur kekuatan negara hegemon. Elemen power hegemoni menurutnya tersusun dari kekuatan material seperti ekonomi, militer, dan teknologi, dan juga termasuk power imaterial seperti sikap, konsep, *language*, dan *lifestyle*. Penerapan keseluruhan elemen power hegemoni di atas membutuhkan dukungan dari sifat toleransi dan pluralitas negara atas perbedaan yang ada di dalam sistem internasional. Kedua sifat ini yang kemudian menjelma menjadi modal bagi suatu negara untuk melegitimasi daya hegemoninya.<sup>18</sup>

Legitimasi hegemoni tidak kemudian menjadi sesuatu yang dapat langsung diterima negara lain. Hal ini disebabkan karena perbedaan perspektif dalam melihat

---

<sup>17</sup> Dimas Dwi Santoso, 2018, *Stabilitas Hegemoni Amerika Serikat Di Tengah Hadirnya Pengaruh Tiongkok Pasca Lahirnya Inisiasi One Belt One Road*, Skripsi, Lampung: Jurusan HI FISIP Universitas Lampung, hal. 24.

<sup>18</sup> *Ibid* Hal. 24

situasi dalam jumlah kekuatan yang dipunyai oleh suatu negara. Disparitasnya antara lain: *pertama*, besarnya kekuatan dilihat sebagai sebuah risiko oleh masyarakat dunia atau negara lain, *kedua*, dilihat sebagai negara yang dapat memelihara kestabilan sistem internasional hingga bisa diterima oleh negara lain melalui institusionalisasi. Institusionalisasi yang terjadi berhubungan karena adanya perwujudan hegemoni yang legitimatif. Harapannya adalah legitimasi dalam corak negara lain menerima kemampuan dan pembagian kekuatan suatu negara hegemon dalam struktural internasional maupun peran dalam mengendalikan sistem internasional.<sup>19</sup>

Legitimasi untuk mengendalikan negara lain adalah tujuan akhir dari hegemoni itu sendiri. Proses itu juga disupport dua faktor, antara lain: *pertama*, pembagian power, termasuk di dalamnya power militer, teknis, dan finansial; *kedua*, dominasi sebuah ide dalam sistem internasional. Hal ini sesuai dengan *core* dari konsep hegemoni berdasar pada pernyataan Adam Watson bahwa hegemoni merupakan suatu kondisi material yang mengoperasikan sebuah “*Great Power*” dalam tindakan sistem bersama. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan besar atau bujukan atas tindakan negara lain secara *de facto* atau pun *de jure*.

Tony Tai-Ting Liu dan Hung Ming-Te memaparkan bahwa untuk mengetahui kesuksesan sebuah negara yang menjadi hegemon di dunia, membutuhkan analisa untuk mengevaluasi keefektivitasan hegemoni. Adapun caranya adalah dengan menguraikan serta memilih indikator pembangunnya di tengah-tengah terjadinya dominasi konsep hegemoni. Selain itu, Liu dan Ming-Te

---

<sup>19</sup> *Ibid* hal. 27

memaparkan juga bahwa asal mula konsep hegemoni diajukan oleh Charles Kindleberger untuk pertama kalinya. Kindleberger yang mengamati posisi negara-negara dalam struktur internasional melalui pemeriksaan sejarah setelah Depresi Besar. Negara sebagai unit yang rasional di saat itu memiliki tendensi untuk memikirkan kepentingan sendiri untuk mengejar kepentingannya dalam keterbatasan yang dipunyai.<sup>20</sup>

Ketika negara-negara yang dalam kondisi mengejar kepentingannya akan cenderung berkelompok sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan bantuan *resource* (alam, ekonomi, perlindungan militer, dan teknologi). Proses pengelompokan yang diinisiasi oleh negara yang terpusat pada satu negara hegemon (pemimpin). Fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep *bandwaggoning* di mana konsep merupakan konsep tentang adanya satu negara yang menjadi “pusat” bagi negara lain, yang kemudian dikembangkan Kindleberger menjadi konsep hegemoni. Pengembangan ini menghasilkan sebuah rekomendasi bahwa sebuah negara hegemon harus menyediakan kebutuhan negara lain untuk terus memelihara stabilitas sistem internasional. Upaya tersebut sekaligus bermanfaat untuk melindungi kebutuhan struktur ekonomi internasional yang panjang dan semakin kompleks. Hal ini dapat diketahui ketika tindakan negara mulai mempertimbangkan daya kepemimpinan dan juga pertimbangan atas bantuan dan power pada aspek ekonomi, politik, dan militer untuk mengontrol pengatura

---

<sup>20</sup> Jurnal Tony Tai-Ting Liu dan Hung Ming-Te, 2011, *Hegemonic Stability and Northeast Asia: What Hegemon? What Stability?*, Journal of Asia Pacific Studies (2011), Vol. 2, No. 2, hal. 218, diakses dalam <https://pdfs.semanticscholar.org/74d4/8099ab6e49685441df54a16c6dabacfc6fc9.pdf> (10/3/2019, 22:10 WIB)

politik internasional dan norma ekonomi dunia, termasuk pertimbangan kepemilikan sumber daya yang dibutuhkan oleh negara-negara di dunia.

Suzan Strange<sup>21</sup> kemudian memberikan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi power hegemoni terhadap negara-negara di dunia secara keseluruhan terdiri atas empat elemen, yaitu:

- a. Elemen keamanan yaitu terdiri dari kemampuan untuk mengancam dan melindungi negara lain dalam bentuk keamanan melalui penggunaan aset militer. Dasar utama elemen ini adalah keunggulannya pada total power militer dalam komposisi distribusi power pada struktur internasional atau dunia, yang kemudian menjadi pusat atau basis negara lain untuk mendapatkan perlindungan keamanan. Faktor-faktor pada elemen ini di antaranya berupa jumlah angkatan bersenjata, jumlah persenjataan militer, serta perjanjian dan program militer bersama baik bilateral maupun multilateral.
- b. Elemen produksi yaitu terdiri dari kemampuan dalam mengontrol sistem produksi barang dan jasa. Hal ini dilihat dari kemampuan negara hegemoni untuk menjadi inisiator serta memimpin perjanjian bilateral atau multilateral di dunia. Faktor-faktor pada elemen ini di antaranya: sumber daya alam, selisih nilai ekspor-impor, serta program dan perjanjian perdagangan bersama baik berskala bilateral maupun multilateral.
- c. Elemen finansial yaitu terdiri dari kemampuan dalam menciptakan pasar modal keuangan dan kredit internasional dalam bentuk penyediaan bantuan atau bahkan piutang kepada negara lain, atau sebaliknya ketika negara lain menjalankan proses peminjaman. Faktor-faktor pada elemen ini di antaranya: nilai bantuan finansial, nilai penyediaan hutang, nilai penyediaan

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Mohd dan Noor Mat Yazid, 2015, *The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political of Economic Stability*, Global Journal of Political Science and Administration, Vol. 3, No. 6, Desember dalam Skripsi Dimas Dwi Santoso. Stabilitas Hegemoni Amerika Serikat di Tengah Hadirnya Pengaruh Tiongkok pasca Lahirnya Inisiasi *one belt and road*. Universitas Lampung: Bandar Lampung, diakses pada <http://digilib.unila.ac.id/31251/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (10/3/2019, 00:05 WIB)

investasi, serta program dan perjanjian ekonomi bersama baik berskala bilateral maupun multilateral.

- d. Elemen ilmu pengetahuan merupakan kemampuan untuk menyediakan pembangunan secara langsung yang berbentuk asistensi pengembangan pengetahuan kepada negara lain. Elemen ini dilihat dalam bentuk akumulasi dan transfer pengetahuan yang diterapkan dalam bentuk penyediaan program beasiswa, transfer teknologi, dan pemahaman bersama dalam bentuk penyediaan bantuan pembiayaan khusus pada pengembangan pengetahuan negara lain. Faktor-faktor elemen ini di antaranya: nilai bantuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta program dan perjanjian transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>

Runtutan konsep hegemoni beserta perkembangannya menunjukkan adanya faktor dan juga indikator yang bermanfaat sebagai landasan pengukuran guna memperkirakan intensitas hegemoni suatu negara atas negara lain. Pemaparan konsep hegemoni sebelumnya menjadi dasar dalam penelitian ini untuk melibatkan institusi hegemoni sebagai dasar penentu hegemoni dominan yang terjadi di negara mitra. Perluasan yang dikemukakan oleh Suzan Strange di sisi lain merupakan landasan yang memiliki fungsi untuk melihat kemampuan pengaruh hegemoni yang dalam penelitian ini disebut dengan "*hegemoni influence*" suatu negara terhadap negara lain.

Konsep hegemoni pada penelitian ini diposisikan sebagai landasan teoritis serta berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh Tiongkok terhadap putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan 3 negara di Amerika Latin dan Karibia. Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara *superpower* selain Amerika Serikat. Seperti diketahui Taiwan sampai saat ini masih diklaim oleh Tiongkok

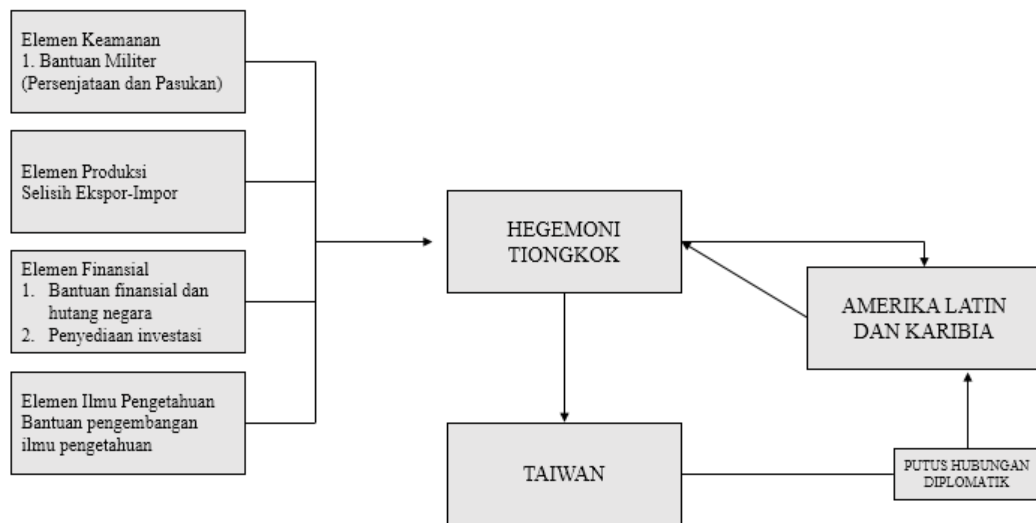
---

<sup>22</sup> Ibid

sebagai bagian dari negaranya akan tetapi Taiwan bersikukuh untuk tetap mempertahankan statusnya sebagai sebuah negara yang sah (independen) dengan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara, di antaranya adalah Panama, Republik Dominika, dan El Salvador yang berada di wilayah Amerika Latin dan Karibia. Hubungan diplomatik Taiwan dengan ke tiga negara tersebut kemudian berakhir dan beralih hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Seperti yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan 3 negara tersebut yang kemudian beralih hubungan diplomatik dengan Tiongkok sebagai bentuk hegemoni Tiongkok terhadap negara-negara yang menjalin hubungan Taiwan demi menghapuskan identitas nasionalnya sebagai sebuah negara dan Taiwan pun dapat kembali menjadi wilayah Tiongkok demi memperkuat status Tiongkok sebagai salah satu negara adidaya. Adapun bentuk hegemoni yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan memanfaatkan sumber dayanya (ekonomi, militer, pendidikan, ekspor impor) untuk menarik ke tiga negara di Amerika Latin dan Karibia ke dalam “pangkuan” Tiongkok. Hal ini tentu saja mengancam stabilitas politik Taiwan karena semakin berkurangnya negara-negara yang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang sah.





Gambar 1.1. Model Pemikiran Penelitian

Skema di atas menunjukkan tentang bentuk elemen hegemoni yang digunakan oleh Tiongkok untuk menarik negara yang menjalin hubungan diplomatik di Amerika Latin dan Karibia (yaitu Panama, Republik Dominika, dan El Salvador). Secara umum Tiongkok menjalin hubungan dengan Amerika Latin dan Karibia dengan memberikan bantuan berupa hutang negara, investasi, ekspor-impor, keamanan, dan juga pendidikan. Perlu diketahui bahwa negara-negara di kawasan ini merupakan negara miskin sehingga mudah bagi Tiongkok untuk memberikan pengaruh. Adapun Taiwan yang semula menjalin hubungan dengan ke tiga negara di kawasan ini tidak dapat berbuat banyak.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Penelitian ini menggunakan unit analisa Reduksionis. Level analisa ini menggunakan unit eksplanasi (variabel independen) yang lebih rendah

dibandingkan dengan unit analisisnya (variabel dependen).<sup>23</sup> Unit eksplanasi (variabel independen) dalam penelitian ini ialah berada pada tingkatan negara-bangsa yaitu pengaruh Tiongkok. Sedangkan unit analisisnya (variabel dependen) ialah pemutusan hubungan diplomatic Taiwan dengan tiga Negara di Amerika Latin dan Karibia.

### **1.6.2 Metode / Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih dengan menggunakan teori dan atau konsep dalam menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian yang menggunakan tipe penelitian eksplanatif akan fokus pada pertanyaan “apa”.<sup>24</sup> Penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk menjelaskan tentang pengaruh Tiongkok terhadap pemutusan hubungan diplomatic Taiwan dengan tiga Negara di Amerika Latin dan Karibia..

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis ialah deduktif. Metode deduktif ialah proses pengumpulan berbagai data sekunder untuk kemudian ditelaah untuk melihat apakah fenomena tersebut dapat dijelaskan atau bahkan diramalkan oleh teori.<sup>25</sup> Teknik analisa deduktif juga menekankan pada proses teorisasi terlebih dahulu kemudian diikuti dengan proses penelitian.<sup>26</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bentuk-bentuk pengaruh Tiongkok yang

---

<sup>23</sup> Mohtar Mas’oed, *Op. Cit.*, hal. 42

<sup>24</sup> Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hal. 30

<sup>25</sup> Mohtar Mas’oed, *Op. Cit.*, hal. 42

<sup>26</sup> *Ibid.*

melatarbelakangi putusnya hubungan diplomatic Taiwan di Amerika Latin dan Karibia.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah melalui kegiatan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya memakai data sekunder sebagai data pokok penelitian.<sup>27</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan melalui pengkajian kepustakaan yang meliputi buku-puku, jurnal, surat kabar, dokumen resmi maupun sumber-sumber internet yang dapat menunjang data yang diperlukan.

#### **1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **a. Batasan Waktu**

Pencarian dan penggalian data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data atau penelitian yang dilakukan pada pemutusan hubungan diplomasi pertama Taiwan dengan Panama pada tahun 2017 hingga pada pemutusan hubungan El Salvador pada tahun 2018. Pertimbangan ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan rinci terkait dengan pengaruh Tiongkok terhadap kegagalan diplomasi Taiwan dengan 3 (tiga) negara di Amerika Latin dan Karibia.

##### **b. Batasan Materi**

Pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup materi yang menjadi bahasan penelitian yaitu pengaruh Tiongkok terhadap Putusnya Hubungan Diplomatik Taiwan dengan 3 negara di Amerika Latin dan Karibia.

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal: 79

## 1.7 Hipotesa

Berdasarkan teori yang dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa pengaruh Tiongkok atas kegagalan Taiwan dalam mempertahankan hubungan diplomatiknya di Amerika Latin dan Karibia disebabkan oleh hegemoni Tiongkok melalui 4 elemen hegemoni yaitu Produksi, Finansial, Ilmu Pengetahuan, dan Keamanan. Selain itu, putusnya hubungan Taiwan dengan Panama, El Salvador, dan Republik Dominika juga dipengaruhi oleh kebijakan “*One China Policy*”.

## 1.8 Sistematika Penulisan

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1. Latar Belakang</li><li>1.2. Rumusan Masalah</li><li>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>1.3.1 Tujuan Penelitian</li><li>1.3.2 Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>a. Manfaat Akademis</li><li>b. Manfaat Praktis</li></ul></li></ul></li><li>1.4. Penelitian Terdahulu</li><li>1.5. Kerangka Konsep<ul style="list-style-type: none"><li>1.5.1. Konsep hegemoni</li></ul></li><li>1.6. Metode Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>1.6.1. Variabel Penelitian dan Analisa Data</li><li>1.6.2. Metode/ Tipe Penelitian</li><li>1.6.3. Teknik Analisa Data</li><li>1.6.4. Teknik Pengumpulan Data</li><li>1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>a. Batasan Waktu</li><li>b. Batasan Materi</li></ul></li></ul></li><li>1.7. Argumen Dasar</li><li>1.8. Sistematika Penulisan</li></ul>
<b>BAB II</b>	<b>Hubungan Tiongkok – Taiwan dan Putusnya Hubungan Diplomatik Taiwan dengan 3 (Tiga) Negara di Amerika Latin dan Karibia</b>

	<p>2.1 Sejarah Tiongkok-Taiwan</p> <p>2.2 Hubungan Diplomatik Taiwan dengan 3 Negara di Amerika Latin dan Karibia</p> <p>2.3 Hubungan Tiongkok dengan Panama, Republik Dominika, dan El Salvador</p> <p>2.4 Kebijakan Tiongkok: <i>One Chian Policy</i> dan <i>One Belt and Road Initiative</i></p>
<b>BAB III</b>	<p><b>Hegemoni Tiongkok dan Putusnya Hubungan Diplomatik Taiwan dengan 3 Negara di Amerika Latin dan Karibia</b></p> <p><b>3.1</b> Elemen Pengaruh Power Hegemoni Tiongkok terhadap Panama, Republik Dominika, dan El Salvador di Kawasan Amerika Latin dan Karibia</p> <p>3.1.1 Elemen Produksi</p> <p>3.1.2 Elemen Finansial</p> <p>3.1.3 Elemen Pengetahuan</p> <p>3.1.4 Elemen Keamanan</p> <p><b>3.2</b> Pemutusan Hubungan Diplomatik Taiwan dengan Panama, Republik Dominika, dan El Salvador</p> <p>3.2.1 Masuknya One Belt and One Road Initiave (OBOR) di Amerika Latin dan Karibia</p> <p>3.2.2 Pengaruh Kebijakan <i>One China Policy</i></p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>Penutup</b></p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>